

# **MEMBANGUN KULTUR POLRI MELALUI KONSEP PERPOLISIAN MASYARAKAT**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Instansi Kepolisian di setiap negara adalah merupakan badan yang sangat penting dan harus ada, karena tanpa aparat Kepolisian niscaya suatu negara akan mengalami kekacauan karena tidak ada organisasi yang bertugas untuk menegakkan aturan-aturan hukum serta menjaga keamanan dan kertertiban suatu negara, hanya setiap negara memiliki istilah, sistem dan perjalanan sejarah sendiri perkembangan Kepolisiannya termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah juga mengajarkan kepada kita bahwa sejak jaman kerajaan-kerajaan dulu fungsi kepolisian sudah ada dengan nama yang beragam. Pada jaman Kerajaan Majapahit dinamakan Bhayangkara, Di Mataram dinamakan Abdi Dalam Prajurit Nirboyo, di Aceh Polisi dinamakan Samudera, di Sulawesi Selatan dinamakan Tomalampona Tuwangke. Pada Jaman penjajahan Belanda fungsi Kepolisian bahkan ada bermacam-macam, antara lain: Algemene Politte (Polisi Umum), Gewapende Politie (Polisi

---

\* Penulis adalah Kabag Ops Pokes Sumba Timur Polda NTT

Bersenjata), dan lain-lain. Pada jaman Jepang Pemerintah Jepang membentuk Kepolisian secara Nasional.

Pada masa Kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan Sidang PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945, menetapkan Kepolisian Negara RI berada di bawah Mendagri antara tahun 1945-1950 peranan Kepolisian sangat menonjol dalam mempertahankan Negara termasuk pada pertempuran 1945 yang dipelopori oleh Polisi istimewa, setelah masa itu Kepolisian RI mengalami beberapa kali perubahan bentuk struktur, Kedudukan, dan Perkembangan sampai akhirnya Polri menjadi bagian dari ABRI yaitu dengan keluarnya UU Pokok Kepolisian No 13 tahun 1961. Sejarah perkembangan Polri akhir tahun 1990an banyak mengalami perubahan antara lain dipisahkannya Polri dari ABRI sejak tanggal 1 April.

Perkembangan sejarah Kepolisian Negara RI tidak lepas dari perkembangan sejarah RI. Polri senantiasa menjadi unsur penting dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. "Para pendiri" Kepolisian RI mempunyai cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang Tata Tentrem Kerta Raharja. Cita-cita dilanjutkan oleh para pemimpin Polri dalam memimpin Polri.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami kemajuan disegala bidang kehidupan meliputi bidang pencerdasan bangsa, kesadaran hukum, kesadaran bernegara, mendorong lahirnya tuntutan agar Polri memberikan pelayanan yang lebih baik Polri juga mendapat kritik tajam atas perbuatan oknum-oknumnya yang kurang berkenan dihati masyarakat. Tuntutan dan kritik tajam merupakan tantangan bagi "generasi muda" Polri untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara. "Belajar dari sejarah" adalah ungkapan yang tidak pernah usang. Banyak hal-hal yang dapat diambil hikmahnya dari perjalanan

sejarah Kepolisian RI. Generasi muda dan pemimpin Polri dapat menggunakannya sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya pada saat ini dan mendatang. Hal-hal yang baik diambil yang buruk di buang agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai bentuk dari apresiasi Penulis kepada almamater PTIK guna dapat dijadikan sebagai masukan dalam peningkatan dan perubahan kultur Polri menuju Polri yang mandiri dan profesional. Penulis sengaja mengangkat konsep Polmas sebagai konsep sentral dalam usaha merubah kultur Polri menjadi yang diharapkan. Konsep Polmas sendiri telah mengalami berbagai tahapan dan pengkajian sampai akhirnya dijadikan sebagai kebijakan yang harus segera dilaksanakan dari tingkat pusat sampai ke kesatuan terbawah. Konsep Polmas yang diadopsi dari Kepolisian Negara Jepang dan Inggris disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya Indonesia.

## **3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

Berbagai permasalahan yang ditemui dalam proses perubahan kultur Polri dari paradigma Polisi lama menjadi Polisi modern sangat kompleks. Untuk lebih jelasnya Penulis akan mencoba membahas sedikit sejarah Kepolisian dari masa ke masa sampai pemisahan dengan ABRI. Permasalahan yang muncul dari usaha Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam merubah kultur adalah:

- a. Polri sudah terlalu lama berada di bawah bayang-bayang TNI sehingga doktrin-doktrin TNI sangat kental terasa dalam kehidupan Kepolisian.

- b. Polri kehilangan jati diri dan melupakan fungsi dan tugas pokoknya.
- c. Polri memerlukan waktu dan sebuah konsep yang baik dalam menemukan jati diri dan menghapus kultur militer menjadi Polisi sipil.

## FENOMENA YANG DI TEMUI

### 1. POLISI MASA ORDE BARU

Instansi Kepolisian dari jaman dahulu kala sudah mengalami beberapa kali perubahan baik secara struktur, kelembagaan, dan organisasi. Sejak jaman perjuangan kemerdekaan Polisi tidak pernah lepas dan selalu ikut ambil dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Begitu pun setelah masa kemerdekaan Polri berperan aktif disamping tugas-tugasnya sebagai pelindung masyarakat juga selalu terlibat dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri yang dilaksanakan bergabung dengan ABRI.

Selama masa Orde Baru Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di bawah Panglima ABRI sehingga atasan tertinggi kita adalah seorang Jenderal TNI. Sehingga dalam bertugas doktrin-doktrin militer sangat kental mewarnai Kepolisian. Pada masa Orde Baru Polisi mengalami masa-masa sulit karena tidak bisa mengatur organisasi sendiri setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus seijin Panglima ABRI sebagai atasan tertinggi.

Selama masa Orde Baru sudah ada beberapa pakar yang mulai mengungkit-gungkit perbedaan peranan antara Polisi dengan Tentara yang dimana tugas Polisi adalah sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, dan pelindung, pengayom, dan

pelayan masyarakat sementara tugas tentara adalah mengamankan negara dari ancaman musuh. Desakan reformasi secara menyeluruh di segala bidang hasilnya menjadi moment yang tepat untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar Polri terpisah dari ABRI. Hal ini akhirnya terwujud dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR 1 April 1999 secara resmi Kepolisian dipisahkan dari tubuh ABRI.

## 2. POLISI MASA REFORMASI ATAU MANDIRI

Dengan dilantiknya Mayjen Pol Drs. Rusmanhadi, SH sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Drs. Dibyso Widodo yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1998 di lapangan Brimob Kelapa Dua Bogor, secara perlahan-lahan Polri mulai menemukan jati dirinya dan berusaha menghapus kesan militer dan arogan dari tubuh Polri. Setelah menjabat KaPolri Jenderal Pol Drs. Rusmanhadi SH mengeluarkan kebijaksanaan dan strategi untuk mensukseskan tugas-tugas Kepolisian dan peningkatan Profesionalisme. Kebijaksanaan yang dikeluarkan adalah etos kerja dan prilaku, sedangkan strateginya adalah 6 Pro (Profesional, Proporsional, Prosedural, Proaktif, Progresif, Produktif) dan 3 K (Komitmen, Konsisten, Koneksen).

Kebijaksanaan etos kerja yang dimaksud adalah jiwa khas anggota Polri dalam bekerja. Khas diartikan pelaksanaan tugas pokok Polri sedangkan kebijaksanaan tentang prilaku adalah prilaku para anggota Polri yang sesuai dengan etos kerja dengan kriteria tertentu yaitu 6 Pro dan 3 K. Diharapkan kebijaksanaan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perangkat lunak berikutnya. Kalau kita pelajari dan pahami secara mendalam strategi 6 Pro dan 3 K adalah merupakan tonggak pencarian jati diri Polri dan awal proses perubahan kultur dari Polisi yang militeristik menjadi Polisi yang mandiri.

Setelah berakhirnya era Jenderal Pol Drs. Rusmanhadi, SH Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh orang-orang terbaik dilingkungan Polri yang mempunyai komitmen serta visi dan misi jauh kedepan mengenai kemajuan Kepolisian Indonesia. Setiap kebijakan dan strategi yang diambil adalah mengarah perbaikan citra Polri dan perubahan kultur Polri menjadi Polisi yang diharapkan masyarakat. Setelah mempelajari dan mengkaji selama bertahun-tahun dengan melibatkan pakar-pakar independen maka di era kepemimpinan Jenderal Pol Sutanto diluncurkanlah konsep Perpolisian masyarakat atau Polmas yang dalam bahasa Inggris disebut Community Policing dengan beberapa kebijakan strategis pendukung sebagai atensi yang harus diutamakan.

Pada era kepemimpinan Jenderal Pol Sutanto Polisi juga mulai dari dalam organisasi sendiri berusaha menghapuskan segala bentuk kasus-kasus KKN terbukti dengan diprosesnya beberapa pejabat Polri yang terlibat kasus-kasus KKN.

### **3. PENGALAMAN KEDINASAN PENULIS**

Penulis adalah Lulusan Akademi Kepolisian Tahun 1997 dengan daerah penempatan pertama Polda Riau sebagai Pamapta di Polresta Pekanbaru (Sekarang Poltabes Pekanbaru). Sejak penugasan pertama sampai sekarang Penulis sudah mengikuti perkembangan dan perubahan dalam berbagai hal Instansi Kepolisian yang sangat pokok dan mendasar. Dimulai dari masa krisis moneter Tahun 1997 yang diikuti berbagai kejadian baik regional maupun nasional yang akhirnya menyebabkan perubahan secara menyeluruh di Indonesia yaitu :

#### **a. Sidang Istimewa MPR 1 Maret 1998.**

Peristiwa ini merupakan tonggak bangkitnya kekuatan masa yang dilatarbelakangi oleh terpilihnya kembali HM. Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998 – 2003.

b. Insiden Tri Sakti

Peristiwa ini diperingati sebagai bangkitnya Reformasi yang ditandai tewasnya 4 Mahasiswa Tri Sakti yang sedang mengadakan unjuk rasa menuntut pertanggung jawaban pemerintah mengenai krisis ekonomi yang berkepanjangan serta maraknya KKN dilingkungan pemerintahan. Ke 4 Mahasiswa yang tewas dianugerahi gelar Pahlawan Reformasi oleh pemerintah.

c. Kerusuhan 13 s.d. 15 Mei 1998 di Jakarta

Setelah insiden Tri Sakti timbul aksi masa yang tidak terkendali di Jakarta, yang diwarnai dengan pengrusakan dan pembakaran gedung-gedung Perkantoran, Toko-toko, Mall dan Swalayan, Kendaraan bermotor, Penjarahan, Perkosaan bahkan Pembunuhan. Tercatat kurang lebih 750 korban jiwa dan kerugian harta benda berupa 13 Pasar, 2.579 Ruko, 40 Mall / Plaza, 1.604 Toko, 4 Bengkel, 11 Polsek, 65 Bank, 24 Restaurant, 9 Pom bensin, Ribuan Mobil dan motor, serta 1.026 Rumah dan Gereja hancur belum termasuk Korban kerusuhan di Solo dan Yogyakarta. Dalam situasi yang demikian kacau akhirnya pada Hari Kamis Tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto merasa tidak dapat lagi meneruskan tugasnya dan menyatakan mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie sebagai Presiden RI.

d. Insiden Semanggi Nopember 1998.

Insiden ini diwarnai dengan jatuhnya korban 13 orang tewas (5 Mahasiswa 2 Pelajar, 6 Masyarakat) dan 253 orang luka berat dan ringan, yang menuntut perubahan secara menyeluruh di Indonesia.

- e. Berbagai kerusuhan yang terjadi di seluruh Indonesia baik yang bernuansa Politik maupun sara yang terjadi secara rencana dan berkepanjangan yaitu:
- 1) Kasus dukun santet di Banyuwangi
  - 2) Kerusuhan Ketapang – Jakarta
  - 3) Kerusuhan Kerawang
  - 4) Kerusuhan Ambon
  - 5) Kerusuhan Sambas
- f. Pemisahan Polisi dari ABRI Tanggal 01 April 1999.

Sejak bergulirnya proses reformasi di Indonesia, jatuhnya pemerintah Orde Baru. ABRI mendapat hujatan dari massa Orde Baru seperti masalah Dwi Fungsi ABRI, Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, masalah Tanjung Priok, Lampung dan lain-lain. Masyarakat menghendaki dipisahkannya Polri dari ABRI, dengan harapan agar Polri menjadi Lembaga yang profesional dan mandiri jauh dari intervensi dalam penegakan hukum. Gagasan pemisahan Polri dari ABRI bukan hal yang Baru, banyak pakar hukum dan ilmu Kepolisian membahas melalui seminar antara Prof. Dr. JE Sahetapy, Prof., Sadjipto Rahardjo, Prof. Dr. Awaloedin Djamin dll, berpendapat bahwa tugas Polisi berbeda dengan Militer. Tugas Militer adalah mengamankan Negara dari ancaman musuh dan aparat Kepolisian bertugas mengamankan masyarakat agar tercipta ketertiban dan rasa aman. Menhankam/pagab Jenderal TNI Wiranto mengatakan pemisahan Polri dari tubuh TNI dilakukan secara bertahap meliputi perubahan struktur organisasi 1 April 1999, tadinya di bawah Mabes ABRI, ditempatkan di bawah Departemen Pertahanan dan keamanan (Dephankam).



g. Polisi mandiri sampai sekarang.

Sejak pisahnya Polri secara struktural dan organisasi dari ABRI, Polri sudah banyak melakukan perubahan-perubahan dan terobosan guna menjawab tuntutan masyarakat. Setiap pemimpin Polri memiliki konsep masing-masing yang intinya menuju visi dan misi Polri kedepan sesuai dengan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polisi yang mandiri dan profesional adalah dambaan dan cita-cita semua orang, khususnya setiap anggota Polri yang ingin maju dan dicintai masyarakat. Perubahan yang paling kelihatan dan cepat dirasakan adalah perubahan fisik yaitu perubahan seragam, stuktur organisasi, dan kepangkatan. Selain perubahan secara fisik Polri juga sedang berusaha merubah paradigma dan kultur budayanya. Dalam hal ini menghapus kesan Militer, arogan, dan anker menjadi polisi sipil yang profesional, mandiri dan dicintai masyarakat.

Penulis yang sebagian besar mengabdikan diri di komunitas Intelejen sangat merasakan segala usaha Pimpinan Polri dalam merubah struktur dan budayanya. Proses ini memang tidak mudah tapi berbekal niat yang tulus dan doa niscaya segala usaha ini tidak akan sia-sia. Perubahan yang tidak kalah penting yang dapat kita rasakan adalah bentuk perhatian pemerintah kepada Polri, kalau dulu jaman Orde Baru apapun yang dimiliki oleh Polri adalah bersumber dari pengadaan ABRI yang notabene sering terjadi kesalah pahaman dan saling mencurigai antar kesatuan sehingga segala bentuk peralatan yang dimiliki Polri sangat kurang dan lambat pembaharuannya, tetapi sekarang setelah mandiri dan terpisah dari ABRI Polri mengurus sendiri kebutuhannya dan mengatur sendiri organisasinya. Polisi juga lebih bebas berkreasi dan menjalin hubungan serta kerja sama dengan instansi lain bahkan

dengan luar negeri mengenai kegiatan--kegiatan yang ada hubungannya dengan Kepolisian. Selain itu dalam rangka merubah kultur dan paradigma Polri, Polri memiliki konsep andalan yaitu Polmas (Perpolisian Masyarakat) atau CP (Comunity Policing). Kalau kita memahami konsep ini secara benar dan menyeluruh maka akan kita temukan perbedaan yang sangat mendasar antara paradigma Polisi lama, Orde Baru, dan Polisi mandiri. Apabila program Polmas ini bisa dilaksanakan dengan baik dari satuan Polri tingkat pusat sampai ke daerah-daerah maka niscaya perubahan kultur yang kita harapkan ditubuh Polri akan dicapai dalam waktu yang relatif singkat.

Hal-hal perubahan yang menjolok dalam perubahan kultur Polri bila dibandingkan antara paradigma lama dan paradigma Baru polisi adalah:

- 1) Polri bertindak prepentif dan proaktif bukan reaktif, yaitu selalu mencegah dan menghindari tidak kriminal dan gangguan kamtibmas bukan menunggu ada kejadian baru turun ke lapangan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan rajin patroli sambang masyarakat dan selalu koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama guna mendengarkan keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat.
- 2) Polri menempatkan diri sejajar dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan kemitraan dan tidak terkesan mengatur, menggurui, atau memerintah. Polri juga tidak merasa menganggap diri lebih hebat, lebih kuasa, atau serba tahu.
- 3) Problem solving atau mengutamakan pemecahan masalah, dalam konsep Polmas cara-cara yang dikedepankan dalam menyelesaikan masalah adalah duduk bersama-sama masyarakat guna mencari solusi yang terbaik, karena kita menganggap masyarakat lebih tahu permasalahan yang terjadi di daerahnya.

- 4) Menghilangkan kesan Militeristik, dengan bpisahnya Polisi dari ABRI diharapkan kesan-kesan dan prilaku Militer pelan-pelan mulai hilang dari kultur Polri, diawali dengan perubahan organisasi, instrumen (Seragam, peralatan, kepangkatan dll) diharapkan Polisi cepat mewujudkan diri sebagai Polisi Sipil yang profesional yang dicintai masyarakat.

Apabila semua perubahan dapat dilaksanakan dengan cepat maka tujuan dari penerapan Polmas dapat segera tercapai yaitu:

- 1) Terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dalam menciptakan ketertiban umum.
- 2) Mencari jalan keluar pemecahan masalah yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
- 3) Menghilangkan perasaan takut warga dalam hidup bermasyarakat.
- 4) Terciptanya mekanisme kemitraan mencakup seluruh proses kegiatan Kepolisian.

Tolak ukur keberhasilan Polri ditandai dengan:

- 1) Polisi dipercaya oleh warga masyarakat
- 2) Polisi mendapat dukungan dari warga masyarakat.
- 3) Terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif dan mantap.
- 4) Polisi dicintai masyarakat

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ada banyak perubahan mendasar yang telah dialami Penulis dari tahun ke tahun mengikuti arah kebijakan Polri, hal ini adalah sebagai akibat dari semakin bebasnya masyarakat menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara dan sarana. Situasi ini harus diikuti oleh perubahan kultur Polri mengikuti perkembangan jaman. Tidak banyak yang dapat kita

lakukan selain selalu berusaha meningkatkan profesionalisme, kemampuan, dan mengikuti pesatnya kemajuan teknologi agar Polri tidak ketinggalan dalam segala hal.

Beberapa contoh langkah-langkah konkret Polri dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan diri adalah dengan dibukanya kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih luas bagi personil Polri yang memenuhi syarat seperti:

- 1) Kesempatan mengikuti pendidikan PTIK, SELAPA, dan SESPIM lebih luas dan terbuka baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 2) Pendidikan-pendidikan kejuruan semakin banyak dan lengkap baik yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri, pendidikan tinggi umum bahkan bekerja sama dengan luar negeri sesuai dengan kebutuhan Polri.
- 3) Sumberdaya manusia yang sebelumnya hanya lulusan SMU perlahan-lahan ditingkatkan menjadi Diploma dan Sarjana.
- 4) Sistem pendidikan dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan polisi masa kini yaitu: lebih ditekankan pada aspek pengetahuan, intelektual, dan profesionalisme dari pada hanya kekuatan fisik..

Dari beberapa langkah dan kebijakan Polri di atas diharapkan lahir polisi-polisi handal yang memiliki kemampuan yang baik dan semangat juang yang tinggi yang siap menyongsong era reformasi, informasi, dan globalisasi.

## **PENUTUP**

Dari ulasan Penulis di atas dapat ditarik adanya benang merah antara perubahan polisi secara struktur dan organisasi dengan

perubahan paradigma dan kultur budayanya. Semakin kedepan tuntutan masyarakat akan pertanggungjawaban kinerja Polri semakin tajam dan transparan. Pola-pola lama dalam cara-cara pengungkapan kasus harus segera ditinggalkan karena masyarakat sudah semakin sadar hukum. Khususnya masalah pelanggaran HAM yang belakangan ini sangat sering kita dengar. Setiap orang harus selalu dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan Pengadilan, jadi cara-cara kekerasan dalam pengungkapan kasus harus ditinggalkan digantikan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sehingga Polisi terhindar dari hujatan--hujatan dan tuntutan pra peradilan dalam pengungkapan kasus-kasus.

Adanya pomeo “lapor hilang ayam menjadi hilang kambing” sudah saatnya dihapus. Masyarakat yang datang kepada polisi sebagian besar adalah korban, wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Langkah-langkah yang harus diambil oleh polisi dalam usaha merebut perhatian masyarakat yaitu :

- Kecepatan Polri dalam menanggapi laporan masyarakat serta turun kelapangan (TKP).
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mempersulit dan menghindarkan berbagai bentuk pungutan.
- Menghindarkan sifat-sifat arogan dalam menghadapi masyarakat.
- Bertindak secara profesional dalam bertugas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga tidak terjadi kesalahan dalam bertugas.
- Memahami dan menguasai tata cara penyidikan tindak pidana yang mana didalamnya mengatur mengenai hak dan batasan kewenangan Polri.

- Selalu berpedoman kepada azas *presumption of innocent*.
- Sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat guna mengetahui keluhan-keluhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- Menempatkan masyarakat berkedudukan sederajat dengan Polri dan menganggap masyarakat sebagai mitra kerja Polri yang sama-sama mempunyai tujuan menciptakan situasi kamtibmas yang mantap dan kondusif

Demikianlah tulisan tentang perubahan kultur Polri ini dibuat oleh Penulis dengan menggambarkan Sejarah Kepolisian Indonesia dari jaman kejaman yang diikuti oleh perubahan struktur organisasi dan paradigma yang disesuaikan pengalaman kerja selama Penulis berdinasi sebagai anggota Polri. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.